

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 merupakan bentuk konkret perlindungan hak politik warga negara dalam sistem demokrasi lokal di Indonesia, khususnya terkait dengan pengaturan ambang batas pencalonan kepala daerah. Putusan ini menurunkan ambang batas pencalonan sebagaimana sebelumnya diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sehingga memberikan kesempatan yang lebih luas bagi partai politik kecil dan calon perseorangan untuk berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap pemenuhan hak politik warga negara serta prinsip keadilan dan kesetaraan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penurunan ambang batas pencalonan sejalan dengan jaminan hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 serta prinsip non-diskriminasi dalam kehidupan politik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan dalam implementasi putusan Mahkamah Konstitusi guna memastikan terwujudnya keadilan dan kesetaraan politik dalam praktik demokrasi lokal.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Ambang Batas Pencalonan, Hak Politik, Demokrasi Lokal, Keadilan.

ABSTRACT

The Constitutional Court Decision Number 60/PUU-XXII/2024 constitutes a significant milestone in strengthening local democracy in Indonesia, particularly in relation to the regulation of the nomination threshold for regional head elections. This decision lowers the nomination threshold previously stipulated in Article 40 paragraph (1) of Law Number 10 of 2016, thereby providing broader political participation opportunities for small political parties and independent candidates. This study aims to analyze the juridical implications of Constitutional Court Decision Number 60/PUU-XXII/2024 on the fulfillment of citizens' political rights as well as the principles of justice and equality in the implementation of regional head elections. The research method employed is normative legal research using statutory, conceptual, and court decision approaches. The findings indicate that the reduction of the nomination threshold aligns with the constitutional guarantee of citizens' political rights as enshrined in Article 28D paragraph (3) and Article 28I paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, may still remain in a disadvantaged position due to the dominance of major political parties. Therefore, strengthening regulations and supervision in the implementation of the Constitutional Court decision is necessary to ensure the realization of justice and political equality in the practice of local democracy.

Keywords: *Constitutional Court, Nomination Threshold, Political Rights, Local Democracy, Justice.*